

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat banyak aspek kehidupan semakin mudah dan terintegrasi. Hal – hal yang sebelumnya susah dilakukan, sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dengan integrasi teknologi. Dalam beberapa tahun ini salah satu hal yang sering dibahas adalah perkembangan teknologi dalam aspek pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri penggunaan teknologi dalam pengintegrasian sistem pemerintahan, akan sangat membantu dalam berbagai hal, mulai dari pelayanan publik, administrasi, maupun menghilangkan redundansi data antar instansi pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden No 95/2018 tentang SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sebuah sistem berbasis elektronik. Sistem tersebut juga berfungsi untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi pemerintahan, karena itu juga dibutuhkan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan secara nasional. Sistem tersebut dinamakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dikenal lebih luas dengan nama *E-Government*.

Dalam pelaksanaannya sendiri, Indonesia pada tiap tahunnya selalu berusaha meningkatkan pengembangan sistem *E-Government*, hal ini bisa dilihat dari penilaian yang dipublikasikan oleh *United Nation* yang berupa *E-Government Development Index* (EGDI) dimana terjadi peningkatan pada indeks negara Indonesia pada tiap tahunnya, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel I-1 Peringkat EGDI Indonesia Tahun 2016,2018,2020

Tahun	EGDI	Peringkat Dunia
2016	0,4478	116
2018	0,5258	107
2020	0,6612	88

Bisa dilihat bahwa tiap 2 tahun dimana dilakukan penilaian EGDI, indeks Indonesia selalu naik, mulai dari 0,447 pada tahun 2016, menjadi 0,525 pada tahun 2018, dan terakhir kali menjadi 0,661 pada tahun 2020, yang membuat Indonesia menjadi peringkat 88 dari 193 negara. Meskipun begitu, masih banyak hal yang harus dikembangkan mengingat dibandingkan dengan negara ASEAN yang lain, indeks Indonesia pada tahun 2020 masih terhitung rendah dan berada pada peringkat 7, yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I-2 Peringkat EGDI Indonesia di Negara – Negara ASEAN

No	Negara	Peringkat Dunia Tahun 2020	EGDI Tahun 2020
1	Singapore	11	0,9150
2	Malaysia	47	0,7892
3	Thailand	57	0,7565
4	Brunei Darussalam	60	0,7389
5	Philippines	77	0,6892
6	Vietnam	86	0,6667
7	Indonesia	88	0,6612
8	Kamboja	124	0,5113
9	Timor Leste	134	0,4649
10	Myanmar	146	0,4316
11	Laos	167	0,3288

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa masih perlu ditingkatkannya pengembangan *E-Government* di Indonesia. Lalu, dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5/2020 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, menandakan perlu dilakukannya penilaian rutin pada tiap instansi pemerintahan yang ada untuk memastikan perkembangan dan implementasi SPBE. Sistem evaluasi tersebut juga memakai bentuk nilai indeks untuk menunjukkan tingkat kematangan SPBE pada tiap instansi. Untuk detail dari sistem evaluasinya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-3 Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 mendapatkan nilai indeks 3.21 yang tergolong baik, namun masih perlu dioptimalkan pengembangan dan integrasi SPBE ada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, untuk meningkatkan efektivitas kerja dan juga mendapatkan hasil indeks yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Presiden No 95/2018, terdapat tujuh bidang layanan publik yang perlu difokuskan dalam pengembangan SPBE. Salah satu dari ketujuh bidang tersebut adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan salah satu dinas terkait adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar (DBMPR Provinsi Jabar). Visi dan misi dari DBMPR Provinsi Jabar adalah membentuk manusia pancasila yang bertaqwa, melahirkan manusia yang berbudaya dan berkualitas, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis tata ruang yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi, dan juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Selain melalui visi misi, DBMPR Provinsi Jabar juga berkeinginan untuk mengatasi permasalahan yang tercantum pada Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian PUPR, seperti yang bisa dilihat pada tabel I-4 dibawah.

Tabel I-4 Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Kualitas dan kapasitas jaringan jalan belum sepenuhnya seragam antardaerah
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.	Keterbatasan anggaran membuat kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
3	Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional	Pertumbuhan jumlah penyedia jasa konstruksi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas.
4	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Kualitas dan kapasitas jaringan jalan belum sepenuhnya dapat mendukung pengembangan wilayah
5	Meningkatnya kemantapan jalan nasional	Kualitas dan kapasitas jaringan jalan belum sepenuhnya dapat mendukung pengembangan wilayah

Penelitian ini ingin berfokus pada permasalahan 1 dan 2, dengan tujuan keterpaduan sistem pada bagian pelayanan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang belum maksimal.

Untuk menyelesaikan masalah terkait keterpaduan sistem yang dijabarkan sebelumnya, maka pendekatan yang dapat mendukung pengembangan SPBE, agar implementasi SPBE tersebut dapat sesuai dengan visi misi dan strategi DBMPPR Provinsi Jabar. Pendekatan ini adalah menggunakan *Enterprise Architecture* (EA). Salah satu *framework* EA yang menurut penulis dapat digunakan untuk mendukung implementasi SPBE adalah *The Open Group Framework* (TOGAF). TOGAF memakai sistem *Architecture Development Method* (ADM), dimana pengerjaan EA dibagi menjadi beberapa siklus, dan pada

tiap siklusnya telah ditetapkan artefak – artefak yang dapat membantu dalam penyusunan arsitektur dan mendapatkan hasil akhir yang lebih efektif. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan berfokus pada penggambaran SPBE pada DBMPR Provinsi Jabar berdasarkan Peraturan Presiden No 95/2018 dan juga TOGAF ADM.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah, :

1. Bagaimana gambaran arsitektur SPBE yang saat ini diimplementasikan pada DBMPR di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana gambaran model arsitektur DBMPR hasil evaluasi berdasarkan Perpres No 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk dapat menyelesaikan masalah pada layanan DBMPR Provinsi Jabar.

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini berfokus pada :

1. Melakukan Evaluasi arsitektur SPBE DBMPR Provinsi Jabar
2. Mengusulkan desain arsitektur perbaikan sesuai pendekatan TOGAF ADM mulai dari analisis data, aplikasi dan proses bisnis eksisting, lalu pembuatan katalog, diagram ataupun usulan yang mampu digunakan sebagai acuan untuk perkembangan SPBE di Provinsi Jawa Barat.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup fokus penelitian terdapat pada DBMPR di Provinsi Jawa Barat.
2. Ruang lingkup fokus penelitian pada *primary activities* di DBMPR Provinsi Jabar.
3. Analisis arsitektur bisnis, layanan, data, aplikasi dan teknologi pada DBMPR Provinsi Jabar berdasarkan Perpres No 95/2018 tentang SPBE

yang berhubungan dengan solusi dari masalah keterpaduan sistem yang tercantum pada Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

4. Analisis yang ada tidak termasuk domain keamanan pada DBMPR Provinsi Jabar.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini:

1. Bagi peneliti lain yang bergerak dalam sistem informasi pendidikan tinggi, penelitian ini dapat menjadi referensi terkait kondisi SPBE pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di tahun 2022.
2. Bagi DBMPR Jabar penelitian ini bermanfaat dalam pengintegrasian sistem informasi pada dinas terkait, serta mampu meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan dalam pelayanan masyarakat umum.
3. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambahkan ilmu dalam perancangan EA.